



Keberpihakan Kompas.id dalam Pemberitaan Perundungan Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia

Nasywa Athifah Putri Permana*, Dandi Supriadi, Ika Merdekawati Kusmayadi

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

Abstrak: Perundungan dalam lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia menjadi isu krusial yang mendapatkan perhatian luas, terutama setelah munculnya dugaan perundungan yang menyebabkan kematian salah satu peserta program. Media daring secara aktif memberitakan kasus ini dan memiliki peran penting dalam menyampaikan perkembangan serta kompleksitas persoalan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberpihakan media dalam memberitakan kasus perundungan dalam pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Media yang diteliti yakni *Kompas.id*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* model Robert M. Entman dengan empat aspeknya yaitu penjelasan masalah, perkiraan penyebab masalah, penilaian moral, dan penawaran penyelesaian masalah. Hasil penelitian terhadap empat berita yang dipublikasikan pada bulan Agustus 2024 menunjukkan keberpihakan *Kompas.id* terhadap korban dalam kerangka penegakan moral dan keadilan sosial. Keberpihakan *Kompas.id* tersebut tercermin melalui adanya pendekatan jurnalisisme advokasi, khususnya dalam upaya mengangkat suara korban secara dominan dalam pemberitaan. Dengan demikian, *Kompas.id* perlu mempertahankan keberpihakan tersebut dengan terus memberikan ruang bagi suara penyintas, dengan tetap menjaga akurasi, verifikasi, dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan. Keberimbangan yang dimaksud yakni tidak hanya berfokus pada pengalaman individu, melainkan juga tetap konsisten mengangkat dimensi struktural seperti kebijakan institusi, regulasi pendidikan, serta tanggung jawab pihak terkait.

Kata Kunci: Dokter Spesialis, Jurnalisme Advokasi, Keberpihakan Media, Perundungan, Pendidikan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2412>

*Correspondence: Nasywa Athifah Putri Permana

Email: nasywa21002@mail.unpad.ac.id

Received: 22-04-2025

Accepted: 22-05-2025

Published: 22-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Bullying within the Specialist Medical Education Program (PPDS) in Indonesia has become a crucial issue that has received widespread attention, especially after the alleged bullying that led to the death of one of the participants of the program. Online media have actively reported this case and have an important role in conveying the development and complexity of the problems that occur. This study aims to determine the media's partisanship in reporting cases of bullying in specialist medical education in Indonesia. The media studied is *Kompas.id*. The method used in this research is a qualitative method with the Robert M. Entman model framing analysis technique, with its four aspects, namely define problems, diagnose causes, make moral judgement, and treatment recommendation. The research results on four news articles published in August 2024 show *Kompas.id*'s partiality towards victims within the framework of moral enforcement and social justice. *Kompas.id*'s partiality is reflected through the advocacy journalism approach, especially in efforts to raise the voice of victims dominantly in the news. Thus, *Kompas.id* needs to maintain this partiality by continuing to provide space for survivors' voices, while maintaining accuracy, verification and balance in every news report. The balance means not only focusing on individual experiences, but also consistently addressing structural dimensions such as institutional policies, educational regulations, and the responsibilities of related parties.

Keywords: Specialist Medical, Advocacy Journalism, Media Partisanship, Bullying, Education

Pendahuluan

Seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang berusia 30 tahun ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kamar kosnya pada Senin (12/8/2024) malam. Korban berinisial ARL ini tewas diduga mengakhiri hidup usai menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. Kronologi ini bermula ketika ARL sulit dihubungi oleh rekan-rekannya sejak Senin pagi (Utami, 2024). Mendengar laporan tersebut, polisi langsung datang ke lokasi dan memanggil dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dipeoriksa, polisi menduga adanya tindakan perundungan (*bullying*) yang dialami ARL.

Kasus perundungan di pendidikan dokter spesialis ini menarik atensi dari banyak pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan juga media massa. Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang menyebarluaskan informasi secara massa dan dapat diakses oleh masyarakat dengan massal (Bungin, 2006). Pemberitaan yang dilakukan berbagai media massa dalam mengangkat kasus ini tentu sangat beragam. Salah satu media massa yang secara intensif dan memiliki upaya mewakili korban dalam memberitakan kasus ini adalah *Kompas.id*.

Kompas.id termasuk intensif dan kerap mewakili suara korban sejak munculnya kasus hingga naiknya ke proses penyidikan. Tak hanya menyampaikan fakta yang sedang ramai terjadi, *Kompas.id* justru membuka beberapa kasus yang dialami oleh korban lain secara komprehensif. Salah satunya artikel berjudul “Dokter PPDS, dari ‘Nge’-kos di Tempat Dosen sampai Belikan Karpet Mobil”. Artikel ini merupakan hasil penulisan ulang oleh redaksi *Kompas.id* dari laporan korban perundungan di pendidikan dokter spesialis (Arlinta, 2024b).



Gambar 1. Tangkapan layar artikel *Kompas.id* dari laporan korban perundungan di pendidikan dokter spesialis (Arlinta, 2024b)

Dalam pemberitaan mengenai kasus perundungan di pendidikan dokter spesialis, *Kompas.id* menyajikan salah satu segmennya dalam rubrik Humaniora bertajuk “Berani Bersuara” yang menyoroti pengalaman dari sudut pandang korban. Dalam segmentasi tersebut, *Kompas.id* mengangkat berita yang bersumber dari aduan beberapa korban yang mengalami perundungan selama menjalani pendidikan dokter spesialis. Hal ini menjadi

berbeda dengan media lain yang tidak memiliki ruang untuk pemberitaan berdasarkan sudut pandang korban dalam kasus ini.

Laporan *Digital News Report 2024* yang diolah *Reuters Institute Study for Journalism* menyebutkan Kompas *online* menempati posisi kedua media *online* yang paling sering diakses khalayak (Steele, 2024). Kompas memperoleh angka 39% responden yang mengaksesnya dalam satu pekan. Masifnya jumlah pengunjung situs Kompas membuat media ini memiliki peran yang besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berbeda dari Kompas.com, *Kompas.id* merupakan media digital berbayar yang mana merupakan transformasi dari media cetak Harian Kompas (Dirgantara et al., 2020). Sebagai media digital berbasis langganan, peneliti melihat Kompas.id kerap menyajikan analisis yang lebih mendalam, penulisan yang lebih baik, serta fakta yang lebih terverifikasi. Kompas merupakan media cetak terbesar di Indonesia sehingga memiliki eksposur yang besar terhadap masyarakat (Yustitia & Ashrianto, 2022).

Kompas.id tidak mencantumkan identitas korban dalam bentuk nama, alamat, dan asal kampus. *Kompas.id* lebih memilih menggunakan inisial daripada nama samaran, dengan alasan bahwa di dunia nyata terdapat orang-orang yang memiliki nama seperti nama samaran tersebut. Melalui pemingkaihan yang dilakukan dalam kasus ini, Kompas.id tidak hanya menjadi pelapor peristiwa tetapi juga berperan dalam memperjuangkan keadilan dan pemberdayaan sosial bersama korban dan penyintas (Hamzah & Yuliana, 2023). Oleh itu, peneliti memilih *Kompas.id* sebagai objek dari penelitian ini.

Media bukan merupakan wadah yang memberitakan suatu isu dengan apa adanya atau sebagai cermin dari suatu realitas yang terjadi. Akan tetapi, media justru mengkonstruksi suatu realitas yang kemudian dilihat oleh publik (Eriyanto, 2002). Kemudian beberapa pertanyaan muncul seperti alasan mengapa sebuah fenomena diberitakan, mengapa hanya sisi tertentu dari suatu fenomena yang diberitakan, hingga mengapa ada salah satu aspek dalam berita yang lebih ditonjolkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang kemudian mengarah ke dalam suatu konsep yang dikenal *framing* (Eriyanto, 2002).

Robert M. Entman (1993) mengemukakan *framing* sebagai proses pemilihan dan penonjolan suatu aspek tertentu dari fenomena untuk mempengaruhi pandangan publik. Secara sederhana, *framing* dapat dilihat sebagai proses analisis dengan tujuan memahami bagaimana realitas yang dibingkai oleh suatu media. Melalui analisis *framing*, seseorang dapat melihat cara media mengkonstruksi realitas. Wartawan dan media yang berperan dengan aktif dalam membentuk realitas tersebut (Eriyanto, 2002).

Memasuki era jurnalisme baru, jurnalis saat ini dapat menerapkan berbagai jenis bentuk atau pendekatan dalam teknik jurnalistik. Fedler (1978) mengklasifikasikan jurnalistik baru ke empat jenis, yakni *advocacy journalism*, *alternative journalism*, *precision journalism* dan *literary journalism*. Dalam konteks kasus perundungan di pendidikan dokter spesialis yang membahas tentang fenomena ketidakadilan atau pelanggaran HAM di masyarakat, terdapat pendekatan yang dapat diterapkan oleh sebuah media, salah

satunya jurnalisme advokasi (Astrid, 2019). Jurnalisme advokasi adalah kegiatan jurnalisme yang dilakukan oleh jurnalis dengan cara menyisipkan opini ke dalam suatu berita (Setiati, 2005). Opini yang disisipkan dalam jurnalisme advokasi bukan berarti menjadikan berita tersebut bias. Jurnalisme advokasi tetap tunduk terhadap prinsip jurnalisme yang berbasis fakta dan menjunjung kebenaran (Astrid, 2019). Pemberitaan yang berpihak pada nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap korban pun menjadi bagian dari praktik ini, terutama dalam isu-isu yang melibatkan ketimpangan relasi kuasa.

Penelitian yang menganalisis pemberitaan terkait perundungan di pendidikan tinggi masih sangat minim, terutama pendidikan kedokteran. Penelitian dan pemberitaan media mengenai perundungan biasanya lebih banyak membahas kasus yang menimpa anak-anak atau remaja di lingkungan sekolah (Tay, 2023). Sementara itu, perundungan yang terjadi di pendidikan yang lebih tinggi seperti universitas masih jarang dibahas. Maka dari itu, analisis yang lebih mendalam terkait pembungkaman dalam pemberitaan media arus utama mengenai isu sosial ditawarkan melalui penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu meninjau keberpihakan *Kompas.id* pada saat memberitakan kasus perundungan dalam pendidikan dokter spesialis di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis *framing*. Secara umum, penelitian kualitatif sangat menaruh perhatian pada proses, fenomena, dan otentisitas (Somantri, 2005). Melalui metode ini, peneliti dapat menggali sebuah pandangan dan pengalaman yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dalam suatu kondisi. Penelitian kualitatif memungkinkan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif terkait masalah sosial (Creswell, 1994).

Fokus dari penelitian ini untuk mendalami keberpihakan *Kompas.id* dalam pemberitaan mengenai kasus perundungan di PPDS. Untuk menganalisis hal tersebut, peneliti menggunakan metode analisis *framing* dalam penelitian ini. Robert M. Entman (1993) mendefinisikan *framing* sebagai konsep untuk mendefinisikan tahapan seleksi serta menonjolkan unsur tertentu dari realitas yang dibentuk oleh media. Entman (1993) mengklasifikasikan konsep *framing* ke dalam empat elemen; *define problems* (penjelasan masalah), *diagnose causes* (perkiraan penyebab suatu permasalahan), *make moral judgement* (membuat penilaian moral), dan *treatment recommendation* (penawaran penyelesaian).

Define problems (penjelasan masalah) merupakan elemen yang paling utama karena menekankan pemahaman jurnalis atas suatu fenomena. *Diagnose causes* (perkiraan penyebab suatu permasalahan) adalah elemen yang bertujuan untuk membingkai pihak yang terlibat dalam sebuah fenomena. *Make moral judgement* (membuat penilaian moral) merupakan elemen yang digunakan sebagai pembenaran atau penyampaian argumentasi terhadap penjelasan masalah yang telah dibuat (Eriyanto, 2002). Elemen selanjutnya yaitu *treatment recommendation* (penawaran penyelesaian) yang digunakan untuk menilai apa kehendak dari suatu jurnalis atau media.

Framing menurut Entman terdiri dari dua dimensi besar, yaitu seleksi isu serta penonjolan aspek tertentu dari sebuah isu (Entman, 1993). Dimensi menyeleksi isu

tersebut berhubungan dengan pemilihan fakta untuk dipahami kemudian diberitakan. Sementara itu, penonjolan aspek tertentu dari sebuah isu berhubungan dengan bagaimana kemudian fakta tersebut ditulis, termasuk pemilihan kata dan penggunaan bahasa.

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen dengan mengumpulkan data primer yang merupakan teks berita mengenai kasus perundungan PPDS di situs portal berita *Kompas.id*. Sumber data lain yang juga digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber lainnya dari *website* yang berhubungan dengan kebutuhan pada penelitian (Launa, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis sejumlah empat berita dalam segmentasi “Berani Bersuara” mengenai kasus perundungan di pendidikan dokter spesialis oleh *Kompas.id* untuk mengetahui keberpihakan *Kompas.id* dalam memberitakan kasus ini. Pemilihan empat berita dalam segmentasi “Berani Bersuara” dilakukan karena jumlah tersebut yang secara spesifik membahas kasus perundungan di pendidikan dokter spesialis berdasarkan sudut pandang korban selama periode waktu yang ditentukan.

Hasil dan Pembahasan

Media Menjelaskan Masalah (*Define Problems*)

Media *Kompas.id* dalam pemberitaan perundungan di PPDS Indonesia secara umum membingkai *define problems* sebagai isu yang bersifat struktural, kompleks, dan memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya sebagai insiden yang melibatkan individual. Dalam berita “Calon Dokter Spesialis Alami Kekerasan Seksual, dari Kelelahan sampai Keguguran”, *Kompas.id* memilih untuk menggunakan istilah-istilah yang kuat secara emosional, seperti “keguguran”, “kehilangan”, dan “meninggal”. Hal ini menjadi bentuk dari penonjolan aspek dengan memilih diksi dan narasi yang bertujuan untuk membentuk empati khalayak. Dampak ini diposisikan tidak hanya sebagai efek samping, namun bukti konkret dari rusaknya sistem PPDS. Pendekatan yang dilakukan *Kompas.id* tersebut juga dapat memperkuat opini publik bahwa kasus ini tidak bisa dianggap remeh.

“Selama masa PPDS (program pendidikan [dokter spesialis](#)) itu saya sampai kehilangan dua anak. Saya sampai keguguran. Satu anak meninggal saat usianya 38 minggu di kandungan dan satu lagi saat akan berusia 29 minggu,” katanya.

Gambar 2. Paragraf ke-2 berita “Calon Dokter Spesialis Alami Kekerasan Seksual, dari Kelelahan sampai Keguguran” (Arlinta, 2024a)

Kutipan berita tersebut berdasarkan kesaksian EG (40), dokter spesialis yang pernah mengalami perundungan hingga keguguran yang merupakan dampak tekanan mental saat menjalani pendidikannya. Pembingkaiian *Kompas.id* dalam berita tersebut berkaitan dengan salah satu nilai berita yang dijelaskan oleh Harcup & O'Neill (2016) yakni berita buruk (*bad news*). Hal ini dikarenakan berita tersebut mengandung muatan emosional negatif dan menunjukkan dampak tragis dari sistem yang kejam dan tidak manusiawi.

Masalah yang dijelaskan oleh *Kompas.id* tidak sekadar berpusat pada praktik perundungan, namun juga melibatkan adanya kesenjangan hubungan kekuasaan antara

konsulen atau dokter senior dengan mahasiswa PPDS. Sebagai contoh, dalam berita “Kami PPDS Harus Menalangi Kebutuhan Hobi Dokter Senior dengan Uang Pribadi”, *Kompas.id* memperlihatkan adanya praktik eksploitasi keuangan yang terjadi di antara relasi hierarkis dalam lingkungan PPDS. Praktik tersebut diperlihatkan sebagai bagian dari kultur sistemik yang membiarkan adanya penyalahgunaan wewenang. Dari berita tersebut, dapat dilihat dimensi penonjolan aspek (Entman, 1993) yaitu *Kompas.id* berulang kali menggunakan diksi yang kuat secara emosional seperti “mempermalukan”, “depresi”, dan “ingin mengakhiri hidup”. Pengulangan terkait tema kekuasaan, tekanan, penghinaan, dan eksploitasi juga memperkuat citra bahwa kasus ini bukan hanya melibatkan seseorang, namun telah menjadi pola struktural.

Tak hanya itu, beliau memberi hukuman yang mempermalukan PPDS yang tidak disukai. Contohnya, dihukum keliling RS bawa kertas bertuliskan “saya melakukan salah” dan minta tanda tangan semua PPDS yang ada di RS kami. Ini sangat tidak manusiawi karena sengaja mempermalukan, sampai depresi ingin mengakhiri hidup karena dipermalukan seperti ini, dengan sengaja.

Gambar 3. Paragraf ke-6 berita “Kami PPDS Harus Menalangi Kebutuhan Hobi Dokter Senior dengan Uang Pribadi” (Ramadhan, 2024)

Dalam kutipan tersebut, *Kompas.id* membingkai akar permasalahannya merupakan perundungan yang dilakukan oknum konsulen berdasarkan pengalaman salah satu peserta didik PPDS di salah satu rumah sakit di Jakarta. Hal ini juga dilakukan oleh Kompas.tv dalam kasus kekerasan seksual, yaitu lebih mengutamakan pernyataan pihak korban (Restiarum et al., 2022). Penelitian tersebut menyatakan bahwa Kompas.tv lebih mengutamakan pernyataan dari pihak korban dalam memberitakan kasus kekerasan seksual. Dalam setiap pembingkai pemberitaan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, pertama adalah proses verifikasi. Verifikasi tersebut berada di aspek kejadian, misalnya apakah benar perundungan terjadi, seperti apa kronologi yang terjadi, siapa pelaku, dan siapa korban dari perundungan tersebut (Heychael, wawancara pribadi, 17 April 2025). Verifikasi merupakan proses penting dalam jurnalisme untuk memastikan kebenaran informasi sebelum dipublikasikan (Kovach & Rosenstiel, 2014). Jurnalis harus memeriksa fakta melalui sumber yang kredibel, membandingkan data dari berbagai pihak, dan menghindari penyebaran informasi yang belum terbukti.

Setelah dilakukannya verifikasi, langkah selanjutnya dalam penulisan berita adalah menentukan *angle* atau sudut pandang penceritaan. Pada tahap ini, pertimbangan etis kembali menjadi hal yang krusial. Salah satu prinsip etika yang paling penting adalah bagaimana jurnalis dapat memberikan ruang bagi korban, yakni dengan menyusun narasi yang tidak mengabaikan pengalaman dan suara mereka (Heychael, wawancara pribadi, 17 April 2025). Hal tersebut selaras dengan pandangan Colón (2011) yang menekankan bahwa tugas jurnalis adalah untuk memperkuat suara mereka yang tidak terdengar, bukan hanya mereka yang sudah memiliki *platform*. Jurnalis perlu mendengarkan dan melihat orang-orang di komunitas mereka untuk memahami perspektif mereka secara mendalam, dan bahwa hal ini sangat penting dalam melaporkan kasus yang melibatkan korban (Colón, 2011).

Peneliti menemukan dalam berita berjudul “Kami Pun Di-”bully” oleh Sistem Rumah Sakit Vertikal”, jurnalis *Kompas.id* membingkai aspek *define problems* yaitu para peserta didik PPDS mengalami eksploitasi dengan bekerja berlebihan serta mengerjakan tugas di luar pekerjaan mereka tanpa diberi gaji. Pembungkahan *Kompas.id* tersebut berkaitan dengan salah satu prinsip dasar etika jurnalisisme oleh (Maflucha, 2024) yaitu aspek kemanusiaan (*humanity*). Berikut penggalan beritanya:

Saya [peserta didik dokter spesialis](#) di salah satu [rumah sakit](#) di Jakarta. Saya masih junior. Kali ini saya ingin cerita bahwa saya juga mendapatkan tindakan [bullying \(perundungan\)](#). Namun, ini bukan di-bully oleh senior atau konsulen, tetapi oleh sistem dari rumah sakit vertikal.

Gambar 4. Paragraf ke-1 berita “Kami Pun Di-”bully” oleh Sistem Rumah Sakit Vertikal” (Arlinta, 2024c)

Selanjutnya, *Kompas.id* menjelaskan masalah pada berita berjudul “Dokter PPDS, Dari “Nge”-kos di Tempat Dosen sampai Belikan Karpet Mobil” menghadirkan perspektif korban perundungan di pendidikan dokter spesialis yang membeberkan bahwa tekanan dalam PPDS yang dialami bukan dari aspek pendidikan namun eksploitasi secara finansial. Berikut kutipan selengkapnya:

Hal itu yang memberatkan saya. Selama masa [PPDS](#) dulu, yang memberatkan bukan karena jaga malam, atau misalnya hanya ditegur. Kalau ditegur karena saya salah, saya bisa perbaiki. Itu justru saya senang. Tetapi yang paling berat untuk biaya-biaya tersebut. Ibu saya sampai tidak menyangka ternyata permintaan [dokter-dokter senior](#) sampai tidak masuk akal.

Gambar 5. Paragraf ke-4 berita “Dokter PPDS, Dari “Nge”-kos di Tempat Dosen sampai Belikan Karpet Mobil” (Arlinta, 2024b)

Berdasarkan penggalan paragraf tersebut, *Kompas.id* membingkai, beban biaya yang berlebihan dan tidak manusiawi dalam PPDS berdampak pada tekanan mental dan finansial bagi mahasiswa PPDS. Hal ini sejalan dengan Yanti et al. (2021) yang menyebutkan bahwa perundungan membuat korban merasakan berbagai gangguan, seperti ketidaknyamanan, takut, hingga menarik diri dari pergaulan sekitar. Seperti yang dilakukan *Kompas.id* pada berita berjudul “Dokter PPDS, Dari “Nge”-kos di Tempat Dosen sampai Belikan Karpet Mobil”, *Kompas.com* dalam penelitian tersebut cenderung mengangkat bagaimana korban diperlakukan oleh pelaku perundungan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa *framing define problems* oleh *Kompas.id* tidak sekadar terpusat pada identifikasi perundungan sebagai praktik tidak etis atau kekerasan antar individu. Dengan melakukan proses seleksi isu, *Kompas.id* memilih untuk membingkai aspek-aspek sistemik, institusional, serta regulasi sebagai akar dari problematika. Sementara itu, dalam penonjolan aspek, *Kompas.id* memperkuat narasi tersebut dengan mengulang tema, menggunakan diksi yang kuat, juga memilih narasumber tertentu khususnya korban.

Media Memperkirakan Penyebab Masalah (*Diagnose Causes*)

Dalam pemberitaan terkait perundungan di pendidikan dokter spesialis, *Kompas.id* dengan aktif melakukan seleksi isu dengan menekankan problematika struktural dan sistemik sebagai penyebab praktik perundungan di dunia pendidikan kedokteran. Dalam berita berjudul “Calon Dokter Spesialis Alami Kekerasan Seksual, dari Kelelahan sampai Keguguran”, *Kompas.id* menyoroti pihak penyebab masalah dalam kasus ini yakni senior PPDS, staf akademik, residen yang memiliki *privilege*, rumah sakit, dan lembaga pendidikan kedokteran terkait. *Kompas.id* menunjukkan terdapat sistem senioritas yang tidak adil, di mana residen yang memiliki *privilege* misalnya merupakan keluarga dari senior mendapatkan perlakuan yang lebih ringan. Hal itu tercermin dalam kutipan berikut ini:

Kondisi tersebut semakin parah ketika saat mendapatkan tugas jaga, ia ditugaskan bersama dengan residen (peserta PPDS) lain yang enggan bertugas. Residen tersebut biasanya merupakan anak dari senior ataupun menantu dari seniornya yang cenderung bertugas seenaknya.

Gambar 6. Paragraf ke-5 berita “Calon Dokter Spesialis Alami Kekerasan Seksual, dari Kelelahan sampai Keguguran” (Arlinta, 2024a)(Arlinta, 2024b)

Pada kutipan paragraf tersebut, *Kompas.id* melakukan pembingkai aspek *diagnose causes* dengan penekanan bahwa terdapat kultur senioritas dan hierarki yang kaku di dalam pendidikan dokter spesialis. Menurut Eriyanto (2002), penyebab masalah dapat dipahami dengan berbeda oleh setiap jurnalis dan media. Dalam hal ini, *Kompas.id* memilih untuk menekankan dimensi struktural sebagai akar dari masalah, bukan hanya perilaku individu pelaku kekerasan.

Selanjutnya, *Kompas.id* membingkai bahwa penyebab masalah dalam berita berjudul “Kami PPDS Harus Menalangi Kebutuhan Hobi Dokter Senior dengan Uang Pribadi” adalah oknum konsulen PPDS yang menyelewengkan kekuasaan dengan memanfaatkan residen untuk kepentingan individu. Berikut kutipan selengkapnya:

Beliau juga *service oriented*, menuntut dilayani untuk hal-hal pribadi yang tidak terkait pelayanan atau pembelajaran. Contohnya, menjemput sampai mengantar ke parkir, membuat kopi, menyiapkan makan, cuci piring, menemani praktik di RS lain, dan lain-lain.

Gambar 7. Paragraf ke-4 berita “Kami PPDS Harus Menalangi Kebutuhan Hobi Dokter Senior dengan Uang Pribadi” (Ramadhan, 2024)

Dalam kutipan tersebut, dijelaskan bahwa banyak tindakan yang diminta oleh konsulen di luar dari kewajiban peserta PPDS pada umumnya. Hal tersebut selaras dengan DiBaise et al. (2018) yang menunjukkan bahwa dalam lingkup pendidikan medis, konsulen menjadi salah satu pihak yang paling sering dilaporkan sebagai pelaku pelecehan atau diskriminasi, baik secara verbal, fisik, seksual, hingga akademik. Hal ini menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan kuasa yang dilakukan konsulen dalam pendidikan klinis. Situasi ini juga sejalan dengan temuan dalam jurnal tersebut, yang

menyebutkan bahwa 34,4% dari kasus pelecehan atau diskriminasi dalam pendidikan kedokteran yakni dilakukan oleh konsulen (DiBaise et al., 2018).

Kompas.id mbingkai aktor penyebab masalah dalam berita berjudul “Kami Pun Di-“bully” oleh Sistem Rumah Sakit Vertikal” yaitu pihak rumah sakit yang minim SDM sehingga banyak pekerjaan yang dialihkan kepada peserta PPDS. Hal ini yang menyebabkan tugas para peserta PPDS menjadi semakin berat dan tidak manusiawi. Menurut Sumiarsih & Nurlinawati (2020), problematika perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDMK) akan berdampak terhadap inefisiensi serta hambatan produktivitas organisasi. Dalam kasus ini, defisit tenaga kesehatan menjadi penyebab beban kerja berlebih yang kemudian dialihkan kepada tenaga yang seharusnya terfokus pada proses pendidikan, yakni peserta PPDS. Dalam pemberitaan tersebut, *Kompas.id* memberikan konteks bahwa problematika ini terjadi dikarenakan minimnya SDM dan kegagalan manajemen rumah sakit dalam menambah tenaga kerja. Berikut kutipannya:

Hal ini sudah berulang kali terjadi. Kami juga sudah sampaikan kepada pihak berwenang rumah sakit untuk penambahan SDM. Namun, tidak ada tata laksana lebih lanjut. Sementara di rumah sakit yang luas ini, setiap kali mendorong pasien dan mobilisasi pasien itu butuh waktu 30 menit sampai 1 jam.

Gambar 8. Paragraf ke-7 berita “Kami Pun Di-“bully” oleh Sistem Rumah Sakit Vertikal” (Arlinta, 2024c)

Selanjutnya, dalam berita berjudul “Dokter PPDS, Dari Nge”-kos di Tempat Dosen sampai Belikan Karpet Mobil”, *Kompas.id* lebih condong menyoroti sisi korban yang menceritakan pengalamannya. Dalam berita ini, *Kompas.id* melihat bahwa kultur senioritas di lingkungan pendidikan dokter spesialis menjadikan mahasiswa PPDS secara terpaksa harus memenuhi permintaan biaya untuk senior dan dosennya. Hal itu tercermin dalam kutipan paragraf berikut ini:

Pernah, suatu ketika, ada dosen saya yang meminta dibelikan sepatu yang menurut saya harganya tidak kira-kira, sekitar Rp 2 juta. Bahkan ada juga yang meminta dibelikan karpet mobil sampai hampir puluhan juta rupiah. Teman saya dulu pun pernah diminta untuk transfer membayarkan belanja online sampai Rp 10 juta.

Gambar 9. Paragraf ke-5 berita “Dokter PPDS, Dari “Nge”-kos di Tempat Dosen sampai Belikan Karpet Mobil” (Arlinta, 2024b)

Dari empat berita tersebut, *Kompas.id* dengan strategis menyeleksi dan menonjolkan aspek-aspek tertentu untuk membangun pemahaman publik bahwa perundungan di PPDS merupakan permasalahan sistemik dan bukan sekadar insiden. Penegasan atas faktor struktural seperti budaya senioritas, beban kerja ekstrem, eksploitasi keuangan, serta kegagalan pihak berwenang dalam memberikan respons turut mengarahkan khalayak untuk sadar bahwa perubahan yang dibutuhkan bersifat menyeluruh, mulai dari kebijakan, sistem kontrol, bahkan kultur dalam dunia kedokteran.

Media Membuat Penilaian Moral (*Make Moral Judgement*)

Dalam pemberitaan terkait kasus perundungan yang dialami mahasiswa PPDS, *Kompas.id* terlihat tidak sekadar memberikan informasi, namun juga dengan aktif membingkai kerangka moral dengan praktik *make moral judgement*. *Kompas.id* membuat penilaian bahwa tindakan perundungan termasuk ke dalam pelanggaran etika dan kemanusiaan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, serta merefleksikan kegagalan sistemik yang besar dalam lingkungan pendidikan kedokteran. Hal tersebut diperlihatkan melalui dimensi seleksi isu, *Kompas.id* menyeleksi fakta-fakta yang menjabarkan dampak negatif dari perundungan, baik dalam segi psikis, fisik, dan juga sosial, serta menekankan tanggung jawab yang dilakukan lembaga dan pihak yang terlibat. Misalnya, pada berita “Calon Dokter Spesialis Alami Kekerasan Seksual, dari Kelelahan sampai Keguguran” dan “Kami PPDS Harus Menalangi Kebutuhan Hobi Dokter Senior dengan Uang Pribadi”, *Kompas.id* menunjukkan pengakuan langsung dari korban mengenai tindakan tidak wajar yang diterima, seperti pemalakan hingga kekerasan seksual, yang memperlihatkan perilaku kekerasan dalam sistem pendidikan kedokteran.

Kompas.id membingkai penilaian moral dalam pemberitaan berjudul “Kami Pun Di-“bully” oleh Sistem Rumah Sakit Vertikal” dengan menjelaskan sistem dinilai tidak manusiawi karena sebenarnya rumah sakit dapat merekrut tenaga tambahan, namun justru mengandalkan peserta didik PPDS. Hal ini berdasarkan pertanyaan korban yang ditulis ulang oleh *Kompas.id*. Berikut kutipan selengkapnya:

Ini menjadi pertanyaan kami. Bukankah rumah sakit pemerintah bisa mengajukan perekrutan pegawai? Apakah malah mengandalkan dokter PPDS yang sama sekali tidak digaji ini?

Gambar 10. Paragraf ke-18 berita “Kami Pun Di-“bully” oleh Sistem Rumah Sakit Vertikal” (Arlinta, 2024c)

Paragraf tersebut menekankan penilaian moral bahwa sistem rumah sakit dinilai tidak manusiawi karena peserta didik PPDS dipaksa mengerjakan tugas di luar tanggung jawab mereka dan tanpa diberi gaji. Berdasarkan pendapat Entman (1993), *framing* merupakan konsep untuk mendefinisikan tahapan seleksi serta menonjolkan unsur tertentu dari realitas yang dibentuk oleh media. Dalam konteks ini, *Kompas.id* membingkai fenomena eksploitasi di PPDS dengan menyoroti kesenjangan hubungan kekuasaan dan ketidakadilan struktural pada mahasiswa sehingga publik tidak sekadar melihat fakta tentang perundungan namun juga memahami soal sistemik yang menjadi latar belakang.

Berdasarkan temuan peneliti, *Kompas.id* menekankan aspek *make moral judgement* dalam berita berjudul “Dokter PPDS, Dari “Nge”-kos di Tempat Dosen sampai Belikan Karpet Mobil” yaitu perundungan dan eksploitasi di lingkungan PPDS sebagai perilaku tidak etis. Penelitian terdahulu karya Edy et al. (2024) membahas tentang *framing* media dalam isu sosial serta bagaimana media memiliki kekuatan dalam menentukan narasi moral di ruang publik. *Kompas.id* dalam hal ini ikut membingkai isu eksploitasi mahasiswa PPDS sebagai bentuk struktural yang tidak adil dan perlu dilihat dengan kritis. Hal itu tertera dalam kutipan yang berbunyi:

Ini, kan, tidak masuk akal. Kalau misalnya sesekali membantu dosen, tentu pada taraf yang wajar, itu tidak masalah. Namun, kalau sudah seperti ini, apakah wajar?

Gambar 11. Paragraf ke-18 berita “Dokter PPDS, Dari “Nge”-kos di Tempat Dosen sampai Belikan Karpet Mobil” (Arlinta, 2024b)

Berdasarkan isi dan gaya penulisan *Kompas.id*, peneliti melihat bahwa berita ini cenderung berpihak kepada korban. *Kompas.id* memposisikan narasi korban sebagai pusat atensi. Hal ini semakin memperkuat keberpihakan *Kompas.id* terhadap korban dalam kerangka penegakan moral dan keadilan sosial. Keberpihakan *Kompas.id* terhadap korban dalam kasus perundungan di pendidikan dokter spesialis dinilai sebagai langkah yang wajar dan dapat dibenarkan secara moral. Posisi tersebut logis karena korban, terutama perempuan yang berada dalam posisi subordinat sebagai peserta didik, umumnya tidak memiliki kekuasaan atau ruang yang memadai untuk menyuarakan pengalaman mereka di ranah publik (Priyadharma, wawancara pribadi, 17 April 2025).

Maka dari itu, dengan pengimplementasian seleksi isu dan penonjolan aspek yang berpusat terhadap moralitas, etika profesi, dan tanggung jawab institusional, *Kompas.id* tidak sekadar menyampaikan narasi perundungan sebagai rangkaian fenomena, namun membuatnya sebagai refleksi dari krisis moral danagalnya sistem PPDS.

Media Menawarkan Penyelesaian Masalah (*Treatment Recommendation*)

Dalam kerangka *framing* Entman, aspek *treatment recommendation* dalam pemberitaan mengenai kasus perundungan di pendidikan dokter spesialis yang telah dianalisis memperlihatkan kecenderungan *Kompas.id* untuk mengarahkan perhatian publik serta pembuat regulasi terhadap solusi-solusi nyata yang dinilai dapat memperbaiki problematika sistemik di sistem pendidikan kedokteran.

Dalam berita berjudul “Calon Dokter Spesialis Alami Kekerasan Seksual, dari Kelelahan sampai Keguguran”, penyelesaian yang disimpulkan oleh media *Kompas.id* adalah perubahan sistem pendidikan dokter spesialis agar tidak membebani peserta didik dan tindak lanjut tegas dari Kementerian Kesehatan berupa sanksi serta evaluasi lebih lanjut. Berikut kutipan selengkapnya:

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan, perundungan yang terjadi dalam proses pendidikan kedokteran harus segera diatasi. Beberapa kali Kementerian Kesehatan sudah berupaya menindaklanjuti adanya laporan perundungan dengan memberikan sanksi pada rumah sakit yang ditemukan adanya praktik perundungan.

Gambar 12. Paragraf ke-14 berita “Calon Dokter Spesialis Alami Kekerasan Seksual, dari Kelelahan sampai Keguguran” (Arlinta, 2024b)

Kompas.id menyimpulkan penawaran penyelesaian masalah pada paragraf tersebut yaitu adanya evaluasi untuk sistem PPDS dan penindaklanjutan kasus oleh Kemenkes. Berita tersebut jika dianalisis berdasarkan konsep jurnalisme advokasi yang dinyatakan Setiati (2005) termasuk ke dalam kategori jurnalisme advokasi. Dilihat dari aspek titik berat berita, fenomena yang dibahas dalam pemberitaan ini bersifat serius serta

menjelaskan dengan rinci kronologi yang terjadi. Narasumber dalam berita ini memang mencakup pihak yang berwenang seperti Menteri Kesehatan. Akan tetapi, narasumber utama dalam pemberitaan tersebut adalah dokter spesialis di Jawa Tengah yang pernah menjadi korban perundungan berinisial EG. Dari segi aspek asas legalitas, *Kompas.id* dalam pemberitaan ini menyamarkan nama korban yang merupakan narasumber dengan menggunakan inisial. Prioritas kerja *Kompas.id* dalam pemberitaan ini yakni mengangkat problematika terkait pelanggaran yang dilakukan kepada korban. Selanjutnya, dari aspek harapan pasca-pemuatan berita, timbul diskusi besar yang kemudian menggerakkan pihak berwenang untuk mengevaluasi kebijakan.

Lebih lanjut, penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) yang ditawarkan media *Kompas.id* melalui berita berjudul “Kami PPDS Harus Menalangi Kebutuhan Hobi Dokter Senior dengan Uang Pribadi” adalah tindakan tegas terhadap oknum konsulen dan pengawasan dari institusi sangat diperlukan untuk mengantisipasi eksploitasi lebih lanjut. Berikut kutipan selengkapnya:

Seringkali kami harus menalangi biaya-biaya untuk kepentingan hobi konsulen tersebut. Tidak jarang, kami Program Pendidikan [Dokter Spesialis \(PPDS\)](#) memakai uang pribadi untuk menalangi kebutuhan tersebut yang besar. Sebab, beliau memiliki hobi mementaskan musik, PPDS wajib mengurus choir, orkestra, rekaman, pembuatan album, videografi, dan fotografi yang semuanya untuk kebutuhan konten pribadi beliau.

Gambar 13. Paragraf ke-2 berita “Kami PPDS Harus Menalangi Kebutuhan Hobi Dokter Senior dengan Uang Pribadi” (Ramadhan, 2024)

Penawaran penyelesaian masalah yang ditonjolkan *Kompas.id* dalam kutipan paragraf tersebut ditunjukkan oleh pengalaman korban yang memperlihatkan terjadinya eksploitasi terhadap peserta PPDS tanpa ada kontrol dari lembaga yang terkait. Mengacu pada konsep jurnalisme advokasi yang dinyatakan Setiati (2005), berita ini juga termasuk ke dalam kategori jurnalisme advokasi.

Dalam berita berjudul “Kami Pun Di-“bully” oleh Sistem Rumah Sakit Vertikal”, penyelesaian yang disimpulkan oleh media *Kompas.id* adalah perlu adanya audit dan perbaikan dalam manajemen dan sistem rumah sakit. *Kompas.id* menyoroti tuntutan soal dilakukannya investigasi atas manajemen anggaran rumah sakit serta mempertanyakan dana tersebut dialokasikan ke mana. Berikut kutipan selengkapnya:

Belum lagi tambahan permintaan untuk berolahraga, seperti bola, dari senior. Namun, kami masih beruntung tidak sampai digebuki seperti rekan di center lain. Namun, bagaimanapun, seharusnya manajemen rumah sakit juga diusut. Ke mana dana untuk pembiayaan SDM sehingga kami harus bekerja seperti ini?

Gambar 14. Paragraf ke-20 berita “Kami Pun Di-“bully” oleh Sistem Rumah Sakit Vertikal”

Dalam berita “Dokter PPDS, Dari “Nge-kos” di Tempat Dosen Sampai Belikan Karpas Mobil”, *Kompas.id* menyoroiti eksploitasi yang terjadi tidak sekadar merupakan kekerasan verbal, melainkan juga ekonomi. Aspek tersebut kemudian ditegaskan kembali melalui seruan agar sistem pendidikan PPDS dibongkar dan pemerintah menentukan regulasi kontrol yang lebih ketat.

Berita tersebut membingkai penawaran penyelesaian masalah yakni pihak berwenang seperti pemerintah dan lembaga pendidikan harus menetapkan kebijakan yang ketat dan mekanisme pengawasan terkait program PPDS. Hal itu sejalan dengan Hardyanti (2023) yang menjelaskan bahwa media memiliki peran yang besar dalam membangun opini publik atas pelaku dan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus perundungan. Hardyanti dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *framing* berita yang dilakukan media lokal seperti Radar Malang lebih menyudutkan pihak sekolah tanpa memberikan ruang klarifikasi dan melindungi pelaku dengan menggunakan kalimat yang lebih halus. Dalam hal ini, *Kompas.id* menampilkan bingkai yang berbeda. Alih-alih sekadar menyalahkan lembaga terkait, *Kompas.id* justru mengangkat tanggapan konkret dari pemerintah, seperti tindakan yang dilakukan Kemenkes.

Dengan demikian, *Kompas.id* tidak sekadar berfungsi untuk menyampaikan informasi, namun juga sebagai pihak yang ikut membingkai arah dari penyelesaian masalah. Penyelesaian yang ditawarkan merupakan hasil dari proses konstruksi realitas yang melibatkan pemilihan narasumber tertentu (misalnya keluarga korban, pihak BEM, pejabat pemerintahan, dan lain sebagainya), penggunaan diksi yang emosional, serta penekanan pada pola yang bukan hanya fenomena.

Simpulan

Berdasarkan analisis, masalah utama yang menjadi inti pembahasan pemberitaan *Kompas.id* adalah isu perundungan di pendidikan dokter spesialis yang bersifat struktural dan berdampak luas, tidak hanya sebagai insiden yang melibatkan individual. Isu tersebut dilihat oleh *Kompas.id* disebabkan oleh adanya problematika struktural dan sistemik. Selanjutnya, *Kompas.id* memberikan beberapa penilaian moral, di antaranya tindakan perundungan termasuk ke dalam pelanggaran etika dan kemanusiaan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, serta merefleksikan kegagalan sistemik yang besar dalam lingkungan pendidikan kedokteran. Penyelesaian masalah yang ditawarkan *Kompas.id* adalah memperlihatkan kecenderungan media untuk mengarahkan perhatian publik serta pembuat regulasi terhadap solusi-solusi nyata yang dinilai dapat memperbaiki problematika sistemik di sistem pendidikan kedokteran.

Berdasarkan seleksi isu dan penonjolan aspek yang dilakukan, *Kompas.id* mendorong khalayak untuk tidak sekadar memahami fenomena yang terjadi, namun juga menginternalisasi urgensi perbaikan sistem sebagai tanggapan atas tragedi dan ketidakadilan yang terdapat di dunia PPDS. Secara keseluruhan, *Kompas.id* memberitakan fenomena perundungan di pendidikan dokter spesialis telah mencerminkan fungsi media massa yakni pengawasan dan korelasi. *Kompas.id* berperan untuk menginformasikan ketidakadilan yang perlu diperhatikan oleh khalayak dan menghubungkan publik dengan suatu sudut pandang untuk membangun kesadaran atas suatu fenomena yang terjadi.

Selain itu, *Kompas.id* juga memberikan ruang yang cukup besar untuk suara korban. Melalui pemberitaan yang mengangkat pengalaman korban di beberapa kampus serta menyoroti kegagalan sistem dan minimnya pengawasan pihak berwenang, *Kompas.id* menunjukkan keberpihakan terhadap korban dalam kerangka penegakan moral dan keadilan sosial. Keberpihakan media tersebut tercermin melalui adanya pendekatan jurnalisme advokasi, khususnya dalam upaya mengangkat suara korban secara dominan dalam pemberitaan. Dengan demikian, *Kompas.id* perlu mempertahankan keberpihakan tersebut dengan terus memberikan ruang bagi suara penyintas, dengan tetap menjaga akurasi, verifikasi, dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan. Keberimbangan yang dimaksud yakni tidak hanya berfokus pada pengalaman individu, melainkan juga tetap konsisten mengangkat dimensi struktural seperti kebijakan institusi, regulasi pendidikan, serta tanggung jawab pihak terkait.

Daftar Pustaka

- Arlinta, D. (2024). *Calon Dokter Spesialis Alami Kekerasan Seksual, dari Kelelahan sampai Keguguran*. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/08/19/kisah-ppds-alami-kekerasan-seksual-kelelahan-sampai-keguguran?open_from=Search_Result_Page
- Arlinta, D. (2024). *Dokter PPDS, Dari "Nge"-kos di Tempat Dosen sampai Belikan Karpét Mobil*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/08/28/dokter-ppds-dari-nge-kos-milik-dosen-sampai-belikan-karpét-mobil-puluhan-juta>
- Arlinta, D. (2024). *Kami Pun Di-"bully" oleh Sistem Rumah Sakit Vertikal*. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/08/22/kami-pun-dibully-oleh-sistem-rumah-sakit-vertikal?open_from=Search_Result_Page
- Astrid, A. F. (2019). Jurnalisme Advokasi Pada Isu Pernikahan Anak Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Komodifikasi, Volume 7*, 158–172. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Komodifikasi/article/download/10055/6979>
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Colón, A. (2011). The Ethics of Journalism: A View from the Media. *Journal of Mass Media Ethics*, 26(2), 153–167.
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publications.
- DiBaise, M., Tshuma, L., Ryujin, D., & LeLacheur, S. (2018). Perceived discrimination, harassment, and abuse in physician assistant education: A pilot study. *Journal of Physician Assistant Education*, 29(2), 77–85. <https://doi.org/10.1097/JPA.000000000000192>
- Dirgantara, H., Supriadi, D., & Bisman, A. (2020). Motif Pelanggan Dalam Menggunakan Kompas.id Sebagai Layanan Media Digital Berbayar. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 3(2), 167. <https://doi.org/10.24198/jkj.v3i2.23837>
- Edy, S., Permadi, D., & Rahadi, A. E. (2024). Literasi Pembingkai Berita Dimedia Massa (Pembingkai Berita Revisi UU ITE Di Kompas.Id). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10874–10885. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11569>

- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS Group.
- Fedler, F. (1978). *An Introduction to the Mass Media*. Florida Technological University.
- Hamzah, I. H., & Yuliana, G. D. (2023). Gender Sensitive Journalism in Harian Kompas as a Media Advocacy Against Women's Sexual Violence. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 43–59. <https://doi.org/10.30656/lontar.v11i1.6194>
- Harcup, T., & O'Neill, D. (2016). What is News? News values revisited (again). In *Journalism Studies*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2016.1150193>
- Hardyanti, W. (2023). Bullying is Never Ending: Construction of Reporting on Cases of Bullying in Schools. *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis*, 11(2), 228–245. <https://doi.org/10.46806/jkb.v11i2.992>
- Heychael, M. (2025). *Wawancara Pribadi dengan Muhamad Heychael*.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). *The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect* (3rd ed.). Three Rivers Press.
- Launa, L. (2020). Robert Entman Framing Analysis of Prabowo Subianto'S Image in Republika.Co.Id March – April 2019 Edition. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3(1), 50–64. <https://doi.org/10.17933/diakom.v3i1.57>
- Maflucha, L. (2024). Etika Jurnalistik Dalam Era Digital: Menghadapi Tantangan Dengan Kode Etik Pers. *Jurnal Media Akademik*, 2(1), 109–124.
- Priyadharma, S. W. (2025). *Wawancara Pribadi dengan Subekti W. Priyadharma*.
- Ramadhan, A. (2024). *Kami PPDS Harus Menalangi Kebutuhan Hobi Dokter Senior dengan Uang Pribadi*. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/08/20/ppds?open_from=Search_Result_Page
- Restiarum, H., Rijnanda, A. A., & Wahyuni, I. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Detik.Com dan Kompas.tv atas Kasus Kekerasan Seksual di Institusi KemenKop UKM RI. *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 4(02), 116–126. <https://doi.org/10.53863/kst.v4i02.547>
- Setiati, E. (2005). *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*. Andi Offset.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Steele, J. (2024). *Digital News Report 2024 Indonesia*. Reuters Institute.
- Sumiarsih, M., & Nurlinawati, I. (2020). Permasalahan dalam Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten/Kota. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 3(3), 182–192. <https://doi.org/10.22435/jpppk.v3i3.2657>
- Tay, E. M. K. (2023). University students' feedback regarding effective measures to prevent bullying. *British Journal of Guidance and Counselling*, June, 1–21. <https://doi.org/10.1080/03069885.2023.2223753>

-
- Utami, K. D. (2024). *Undip dan RSUP Dr Kariadi Akui Ada Perundungan, Perbaikan Bakal Dilakukan*. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/09/13/undip-dan-rsup-dr-kariadi-akui-ada-perundungan-perbaikan-bakal-dilakukan?open_from=Search_Result_Page
- Yanti, F. D., Fata, A. K., & Anwari, A. (2021). Berita Bullying Di Media Online (Analisis Wacana terhadap Kompas.com dan Republika Online). *Jurnal Jurnalisa*, 7(1), 1–24. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v7i1.20718>
- Yustitia, S., & Ashrianto, P. D. (2022). Exploration of Kompas Editorial Frames on Human Rights Issues during 2014-2021. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 10(2), 99–106. <https://doi.org/10.12928/channel.v10i2.226>